RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024



DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SRAGEN



Jl RA Kartini Nomor 160 Telp. 0271 (890645) SRAGEN
Website :www.sragenkab.go.id Email : disnaker@sragenkab.go.id
Sragen 57222

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

RENCANA KERJA

TAHUN 2024

*

*

*

*

*

*

DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN SRAGEN

2023

KATA PENGANTAR

Nomor : 560/3608/016/2023

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja untuk masa mendatang.

Sragen, 2 Agustus 2023

Kepala Dinas
Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Sragen

Agus Winarno, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710313 199803 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

LAMPIRAN vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tusi Perangkat Daerah . 30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 46

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA 47

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 47
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja .. 48
3.3 Program dan Kegiatan 50

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA 54

BAB V PENUTUP 60

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan (Tahun 2023) Dinas Tenaga Kerja 16

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen . 26

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2024 Kabupaten Sragen..... 35

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024..... 46

Tabel 3.1. Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja 49

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025..... 54

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), salah satunya adalah dengan cara mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), atau lebih memfokuskan pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam 1 (satu) tahun mendatang agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, setiap Perangkat Daerah harus berperan aktif, termasuk dalam hal menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam mewujudkan pencapaian kinerja yang lebih baik, maka sangat diperlukan suatu dokumen perencanaan yang tersusun dengan baik yang kinerjanya dapat diukur dengan jelas dan tepat. Salah satu dokumen perencanaan adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah, dengan tahapan di dalamnya termasuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan di tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/ kota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di tingkat pusat maupun provinsi.

Dalam pelaksanaan pembangunan maka keterlibatan stakesholders atau para pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholders di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan rencana strategis, sesuai dengan tugas pokoknya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan SKPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu pada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga sifat dari rencana kerja dimaksud adalah sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 dengan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen.

2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, hasil evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2022, dan hasil evaluasi proyeksi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2023. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

3. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Tindak Lanjutnya dengan Proses Penyusunan RAPBD

Dalam bidang pembangunan ketenagakerjaan di Jawa Tengah masalah utama yang masih dihadapi adalah tingginya angka pengangguran yang ditunjukkan oleh angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). TPT di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2021 sebesar 5,95 % mengalami penurunan di periode berikutnya, yaitu tahun 2022 sebesar 5,57 % (Data BPS Provinsi Jawa Tengah). Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sragen di tahun 2022 sebesar 4,76 %, sedangkan di tahun 2022 sebesar 4,69 %. Masih tingginya angka pengangguran ini membutuhkan penanganan dalam usaha menurunkan tingkat pengangguran khususnya di Jawa Tengah.

Dalam penanganan pengangguran ini merupakan upaya terpadu dari berbagai pihak yang mengarah pada upaya-upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok seperti buruh tani dan petani penggarap, nelayan, buruh industri kecil dan sektor UMKM. Upaya pengurangan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru, dan yang kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dalam upaya untuk mendukung hal diatas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 untuk membantu menurunkan pengangguran khususnya di Kabupaten Sragen.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 disusun berpedoman pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dan penetapan Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang merupakan dasar pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 sesuai dengan landasan-landasan hukum yang terkait.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 ini merupakan tahun ke empat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021-2026 tersebut, Dinas Tenaga Kerja mempunyai 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selain itu,terdapat indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja serta indikator kinerja penunjang yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen mengedepankan prioritas-prioritas, sasaran yang mendukung misi keempat " Menangani Kemiskinan dan Memperluas Kesempatan Kerja" yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dengan sasaran ke 4.2 yaitu "Menurunnya angka pengangguran".

Dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yaitu Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026. Didalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026, dirumuskan tujuan jangka menengah yaitu "Meningkatnya Pengurangan Pengangguran". Hal ini selaras dengan tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Sragen, yaitu dengan meningkatkan partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sragen. Disamping itu, Renja yang disusun ini telah disinkronisasi dengan acuan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja

Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sragen Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, antara lain mengacu pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 71);
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 85).
13. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahun 2024 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Sragen;
2. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen jangka pendek yaitu dalam jangka 1 (satu) tahun;
3. Menyelaraskan Rencana Strategis Kabupaten Sragen dengan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen, usulan masyarakat dan

evaluasi kinerja tahun lalu menjadi Renja Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen;

4. Mewujudkan sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pelaksanaan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen;
5. Menentukan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 adalah:

1. Menjadi acuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan RKPD;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen selama tahun 2024;
3. Menjadi pedoman monitoring dan evaluasi pencapaian target Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditentukan;
4. Mewujudkan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen yang akuntabel dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan tahunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen tahun sebelumnya, yang disandingkan dengan pencapaian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2023.

Pada tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 18 (delapan belas) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebagaimana tertuang di dalam APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 14.968.508.240,00 (Empat belas milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar 13.789.375.489,00 (Tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), dengan capain realisasi anggaran sebesar 92,12%.

1. **Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan**

   Pada Tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 18 (delapan belas) kegiatan, dan 42 (empat

puluh dua) sub kegiatan. Dari keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen tersebut, terdapat 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil, yaitu:

1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi,
   a) Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota,
      1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota,
      2. Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Sedangkan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lain telah memenuhi/mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Dari keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen terdapat 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 40 (empat puluh) sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1. Sub Kegiatann Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      6. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

e) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
   1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2) Program Perencanaan Tenaga Kerja
   a) Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
      1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
   a) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dengan indikator Prosentase Peserta Lulus Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
      1. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan indikator Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan berdasarkan klaster kompetensi (PBK).
      2. Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja dengan indikator Jumlah Instruktur yang disediakan untuk fasilitasi pelatihan metodologi.
   b) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
      1. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
   c) Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
      1. Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi.
   d) Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

e) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   1. Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

4) Program Penempatan Tenaga Kerja
   a) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota
      1. Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja dengan indikator Orientasi Pra Penempatan AKL dan AKAD
      2. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
      3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
      4. Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
   b) Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      1. Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
      2. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
   c) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
      1. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
      2. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
      3. Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja
   d) Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
      1. Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
      2. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
      3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

5) Program Hubungan Industrial

a) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
2. Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

b) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi.
4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
5. Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pada tahun 2022, terdapat sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen yang melebihi target kinerja , terdapat 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1(satu) sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil, yaitu:

1) Program Penempatan Tenaga Kerja

a) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja

4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Program/ Kegiatan yang Terpenuhi, diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

   Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan perencanaan awal, sehingga seluruh target dapat terpenuhi.

2) Program/ Kegiatan yang Tidak Tercapai, yaitu Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, pada Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

   Pelaksanaan program pembangunan Kawasan Transmigrasi memiliki capaian kinerja 50 % , tidak sesuai dengan target 100 %. Sesuai target Tahun 2022 yang awalnya akan memberangkatkan 2 KK (Kepala Keluarga), namun dengan adanya surat edaran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 475/ 1393 Tahun 2022, perihal pembatasan transmigran menjadi 1 KK. Sehingga di tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen hanya memberangkatkan 1 KK (Kepala Keluarga), dengan capaian kinerja 50 %.

3) Program/ Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja diantaranya Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja

   Sub Kegiatan Job Fair memiliki target di tahun 2022 yaitu 15 perusahaan yang mengikuti Job Fair. Pada saat pelaksanaannya, perusahaan yang mengikuti job fair sebanyak 35 perusahaan. Capaian kinerja di tahun 2022 sebesar 233,33 %.

5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra

Dengan adanya wabah COVID-19 di Kabupaten Sragen sedikit banyak menjadi faktor penyebab adanya perubahan sistem penganggaran daerah yaitu dengan adanya refocusing / rasionalisasi anggaran yang ditujukan untuk prioritas penanganan wabah Covid-19, hal ini menyebabkan

banyak kegiatan yang terhambat saat dilapangan dan sekaligus membuat tidak tercapainya beberapa target kinerja dalam kegiatan OPD.

6. **Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan**

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk meningkatkan capaian kinerja dan mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan antara lain:

1) Dalam perencanaan target kinerja, diupayakan berdasarkan kondisi yang sebenarnya dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
2) Meningkatkan pemahaman dasar tentang dokumen perencanaan baik dari tingkat pemangku kebijakan tertinggi sampai pelaksana teknis kegiatan, sehingga dokumen perencanaan tidak dianggap hanya sebagai kelengkapan administratif agar hasil pelaksanaan kegiatan dapat lebih terukur dan jelas;
3) Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, perhatian utama bukan hanya pada proses dan penyerapan/pencairan anggaran, tetapi juga harus lebih memperhatikan factor-faktor penting dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja untuk menghindari permasalahan seperti:
   a) Fokus kinerja tidak sesuai dengan indikator kinerja utama;
   b) Target kinerja tidak berorientasi pada hasil/outcome;
   c) Dokumen perencanaan yang satu dengan yang lainnya tidak konsisten;
   d) Cascading yang tidak tepat;
   e) Indikator kinerja tidak dapat diukur secara obyektif dan tidak relevan;
   f) Data capaian kinerja yang tidak konsisten sehingga mengakibatkan penentuan target kinerja terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Tabel 2.1 (Tabel T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023) Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		100	100	100	100	100	100	100	100.00%
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**									
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15	0	0	0	0	0	0	100.00%
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
2	07	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60	12	12	12	100	12	36	60%

2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
2	07	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	12	12	12	100	12	36	60%
2	07	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60	12	12	12	100	12	36	60%
2	07	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan logistik kantor	60	12	12	12	100	12	36	60%
2	07	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah penyediaan logistik kantor	60	12	12	12	100	12	36	60%
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60	12	12	12	100	12	36	60%
2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Kearsipan	6	2	1	1	100	1	4	66.67%
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
2	07	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi dan perlengkapan kantor	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	60	12	12	12	100	12	36	60%
2	07	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	60	12	12	12	100	12	36	60%
2	07	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	60	12	12	12	100	12	36	60%
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
2	07	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	12	12	12	100	12	36	60%
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	60	12	12	12	100	12	36	60%

2	**07**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**										
2	07	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah tenant Technopark yang difasilitasi pendampingan	220	0	0	0	0	30	30	13.63%
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**										
2	**07**	**02**	**2.10**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**										
2	07	02	2.10	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah database ketenagakerjaaan dan pembuatan Aplikasi	5	0	1	1	100	1	3	60%
2	07	02	2.10	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK Mikro	125	0	15	15	100	20	50	40%
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**										
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	Jumlah pencari kerja yang mengukuti pelatihan berdasarkan kompetensi (PBK)									
2	07	03	2.01	01	Proses pelaksanaan Pendididikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun n	464	28	80	609	761	80	717	154.52%
2	07	03	2.01	02	Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana	80	0	16	16	100	16	32	40%
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**										
2	07	03	2.02	01	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah lembaga LPK yang dibina dengan Bimtek dan Akreditasi	150	30	30	30	100	30	90	60%

2	**07**	**03**	**2.03**		**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**									
2	07	03	2.03	01	Penyediaan sumberdaya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Jumlah Lembaga LPK yang diVerifikasi Untuk Perizinan LPK	25	0	5	5	100	5	10	40%
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**									
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah tenant Technopark yang difasilitasi pendampingan	518	0	118	118	100	100	218	42.08%
2	**07**	**03**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
2	07	03	2.05	01	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja perusahaan yang mendapat pengukuran kompetensi dan produktifitas	600	0	120	120	100	120	240	40%
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**									
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**									
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Orientasi Pra Penempatan AKL dan AKAD	1845	0	200	200	100	310	510	27.64%
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Sosialisasi dan Bimbingan Jabatan kepada pencari kerja	16580	16	100	100	100	4070	4186	25.24%
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah pencaker yang mendapat pelayanan	840	0	40	40	100	200	240	28.57%
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui perluasan kesempatan kerja	3032	0	20	20	100	432	452	14.90%
2	**07**	**04**	**2.02**		**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1**									

					(satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2	07	04	2.02	01	Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi	Jumlah Lembaga yang mendapat Ijin	293	0	5	5	100	72	77	26.27%
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan pengendalian LPTKS	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	358	0	70	70	100	72	142	39.66%
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**									
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	Jumlah pemeliharaan Aplikasi informasi pasar kerja online	60	0	12	12	100	12	24	40%
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah job canvasing di perusahaan dan jumlah pencari kerja	30000	4556	5000	5000	100	5000	14556	48.52%
2	07	04	2.03	03	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	1750	0	250	528	211.2	300	828	47.31%
2	**07**	**04**	**2.04**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota**									
2	07	04	2.04	01	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	647	10	63	58	92.06	122	190	29.36%
2	07	04	2.04	02	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	4200	0	200	200	100	1000	1200	28.57%
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	416	0	16	16	100	100	116	27.88%
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**									

2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjajanjian kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota**									
2	07	05	2.01	01	Pengesahan peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang dibina dan membuat peraturan perusahaan	25	0	5	7	140	5	12	48%
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang dibina dan membuat perjanjian kerja bersama	10	0	2	2	100	2	4	40%
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah perusahaan yang dilakukan pendataan dan pembinaan	350	30	70	70	100	70	170	48.57%
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Daerah Kabupaten/Kota**									
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang diberi pembinaan pencegahan perselisihan	125	30	25	25	100	25	80	64%
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang terfasilitasi penyelesaian perselisihan	125	30	25	25	100	25	80	64%
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi	Jumlah Serikat Pekerja/Buruh dan Organisasi Pengusaha yang di Verifikasi	370	0	74	74	100	74	148	40%

					serikat pekerja/serikat buruh serta non afillasi									
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	Jumlah perusahaan yang dibina LKS Tripartit	150	0	30	30	100	30	60	40%
2	07	05	2.02	05	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Jumlah Perusahaan yang di bina	100	0	10	10	100	10	20	40%
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**									
3	**32**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**									
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**									
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kerjasama antar wilayah, pelaku dan antar sektor lembaga	10	0	2	1	50	2	3	30%
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan penempatan transmigrans yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penempatan calon transmigrans	10	0	2	1	50	2	3	30%
					Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah KK yang difasilitasi untuk perpindahan serta penempatan transmigrasi	1	1	0	0	0	0	1	100%

KETERANGAN :
n : Tahun perencanaan (2024)

Sragen, 2 Agustus 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Sragen



Agus Winarno, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19710313 199803 1 008

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen telah menentukan tujuan dan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sragen dan Renstra Tenaga Kerja Kabupaten Sragen.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen pada tahun 2021– 2026 menentukan indikator tujuan, indikator sasaran, indikator tujuan penunjang, indikator sasaran penunjang, dan indikator program yang terkait dengan kinerja pelayanan sebagai berikut:

Indikator Tujuan	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Indikator Sasaran	:	Tingkat produktivitas tenaga kerja
Indikator Tujuan Penunjang	:	Predikat Akuntabilitas Kinerja (Predikat SAKIP) Perangkat Daerah
Indikator Sasaran Penunjang Penunjang	:	Predikat kinerja SAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen.
Indikator Program	:	1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja; 2. Persentase peserta pelatihan yang terserap di DUDI; 3. Persentase penempatan tenaga kerja ; dan 4. Cakupan perusahaan yang membuat PP (peraturan perusahaan); 5. Persentase transmigran yang ditempatkan.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 tersebut kemudian dijabarkan melalui Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara periodik setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 2.2.(Tabel T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Sragen

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)			69,92	70,24	71,24	72,24	69,40	69,92	70,24	71,24	
2	Tingkat produktivitas tenaga kerja (milyar)			8,250	8,251	8,252	8,253	6,149	8,251	8,252	8,253	Realisasi capaian kinerja di tahun 2022 sebesar 74,53 % dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya PHK dan perekonomian masyarakat sedang melemah sehingga tingkat

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
												produktivitas tenaga kerja juga rendah.
3	Predikat kinerja SAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen(predikat)			70,20	70,30	70,40	70,50	68,60	70,20	70,30	70,40	
4	Persentase penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja (persen)			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase peserta pelatihan yang terserap di DUDI (persen)			45	50	55	60	45	50	55	60	
6	Persentase penempatan tenaga kerja (persen)			62,92	64,81	66,75	68,75	54,98	62,92	64,81	66,75	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
7	Cakupan perusahaan yang membuat PP (peraturan perusahaan) (persen)			70	75	80	85	70	75	80	85	
8	Persentase transmigran yang ditempatkan (persen)			100	100	100	100	50	100	100	100	

Dari uraian Tabel 2.2. tersebut Pencapaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen yang dapat dilihat dari Indikator kinerja tujuan (nomor 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indikator sasaran (nomor 2) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja merupakan IKU Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. IKU Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang merupakan IKK Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 pada Sasaran Misi Keempat Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yaitu "Menangani Kemiskinan dan Memperluas Kesempatan Kerja". Indikator kinerja Predikat kinerja SAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen (nomor 3) merupakan indikator sasaran penunjang dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang merupakan IKK Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 pada

Sasaran Misi Kedua Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 berupa "Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan" dengan indikator sasaran Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP).

Indikator Kinerja Persentase penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja, Persentase peserta pelatihan yang terserap di DUDI, Persentase penempatan tenaga kerja, Cakupan perusahaan yang membuat PP, dan Persentase transmigran yang ditempatkan merupakan indikator kinerja program dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tusi Perangkat Daerah

Isu-isu terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi merupakan tugas yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja. Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen maka urgensi perencanaan menjadi penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu terkait pembangunan dan pengembangan urusan tenaga kerja dan transmigrasi secara khusus di Kabupaten Sragen. Isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja diantaranya sebagai berikut :

1. Tantangan kualitas angkatan kerja.

   Struktur kualitas tenaga kerja di Kabupaten Sragen masih tergolong rendah dalam upaya pemenuhan produktivitas industri/ perusahaan. Seringkali angkatan kerja yang ada belum mampu diakomodir oleh dunia usaha dan industri karena kurangnya ketrampilan dan kecakapan tenaga kerja. Dalam hal ini membutuhkan keseriusan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten.

2. Tantangan perencanaan tenaga kerja.

   Dalam upaya mencari solusi strategi ketenagakerjaan di Kabupaten Sragen yang tepat penting untuk adanya perencanaan tenaga kerja yang menyajikan data ketenagakerjaan dari perusahaan sebagai data awal.

3. Tantangan penempatan dan perluasan tenaga kerja.

   Saat ini tantangan yang dihadapi adalah banyakna jumlah pengangguran terdidik. Lulusan SMK yang diharapkan dapat menjadi tenaga kerja siap pakai ternyata juga menjadi persoalan dan menjadi penyumbang tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hal ini terjadi dikarenakan terjadi *missmatch* antara sistem pendidikan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

4. Tantangan hubungan industrial.

   Permasalahan ketenagakerjaan juga berkaitan erat dengan hubungan industrial. Hubungan industrial yang harmonis diantara tenaga kerja dan perusahaan juga serikat pekerja dapat menjadi faktor penentu keberhasilan pengurangan pengangguran.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 disusun berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanan yang berpedoman pada

RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang kemudian dijabarkan menjadi dokumen perencanaan tahunan berupa RKPD Kabupaten Sragen. Dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen mengusulkan untuk melaksanakan 6 (enam) program, 19 (sembilan belas) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp12.162.872.497,00 (Dua belas milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Rencana Kerja Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 disusun berpedoman pada Renstra Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024. Rumusan program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator kinerja dalam Rencana Kerja Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 telah dimutakhirkan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Sebelum Renja ditetapkan, reviu Renja terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Renja Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024, meliputi:

1. Identifikasi program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian, dan pagu indikatif; dan
2. Identifikasi perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Renja.

Proses reviu Renja Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024 dilakukan dengan tujuan, antara lain:

1. Menjamin perumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian, dan pagu indikatif Renja sudah selaras dengan RKPD;

2. Mengidentifikasi perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Renja, misalnya terdapat rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program, kegiatan, dan subkegiatan sudah sesuai namun terdapat perbedaan lokasi, indikator kinerja, target capaian, maupun kebutuhan dana; dan
3. Memberikan catatan penting terkait temuan-temuan hasil identifikasi perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Renja.

Selama proses penyusunan Renja Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 dengan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, hingga penetapan Renja Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024, terdapat dinamika perubahan dibandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024. Berdasarkan hasil reviu terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024, rumusan program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan indikator kinerja dalam Renja Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 tidak ada perbedaan, yaitu dengan merumuskan 6 (enam) program, 18 (delapan belas) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan. Perbedaan antara rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Renja Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024, antara lain:

1. Perbedaan total pagu indikatif rancangan awal RKPD dengan total kebutuhan dana Renja Dari usulan total pagu indikatif rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024 sejumlah Rp 9.012.865.497,00 (Sembilan miliar dua belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), hasil analisis total kebutuhan dana dalam Renja Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 menjadi Rp 8.946.519.533,00 (Delapan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah). Perbedaan pagu indikatif dengan kebutuhan dana yang berkurang sejumlah Rp 66.345.965,00 (Enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dikarenakan keterbatasan APBD Kabupaten Sragen, sehingga harus memetakan skala prioritas pembangunan daerah.
2. Perbedaan pagu indikatif subkegiatan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan dana sub kegiatan Renja Perbedaan total pagu indikatif

rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024 dengan total kebutuhan dana Renja Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 berdampak pada perbedaan kebutuhan dana pada sebagian besar program dan kegiatan yang merupakan dampak secara langsung dari penyesuaian kebutuhan dana pada sub kegiatan di bawahnya. Penyesuaian kebutuhan dana pada sub kegiatan dalam Renja Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 beberapa mengalami kenaikan, tetapi sebagian besar mengalami penurunan, antara lain:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN;
c. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor;
d. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
f. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro;
g. Proses pelaksanaan Pendididikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi;
h. Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
i. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
j. Penyediaan sumberdaya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi;
k. Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
l. Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
m. Pelayanan Antar Kerja;
n. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja;
o. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
p. Perluasan Kesempatan Kerja;
q. Penyediaan sumber daya perizinzn LPTKS secara terintegrasi;
r. Pengawasan dan pengendalian LPTKS;
s. Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online;
t. Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online;
u. Job Fair / Bursa Kerja;
v. Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI);
w. Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran;

x. Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan;

y. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan;

z. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;

aa. Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;

bb. Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afillasi.

3. Perbedaan target capaian sub kegiatan rancangan awal RKPD dengan target capaian sub kegiatan Renja Penyesuaian kebutuhan dana pada Renja Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 berdampak pada penyesuaian target capaian subkegiatan dalam beberapa sub kegiatan yang ada sesuai dengan kebutuhan di Dinas Tenaga Kerja.

Hasil analisis kebutuhan berdasarkan reviu Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3. (Tabel T-C.31) di bawah ini

Tabel 2.3 (Tabel T-C.31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen

Kode							Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	07						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
2	07	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disnaker	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	9.012.865.497	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disnaker	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.946.519.533	
2	07	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	5.000.000	
2	07	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.000.000	

2	**07**	**01**	**2.02**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Disnaker	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.815.536.302	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Disnaker	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.119.865.497	
2	07	01	2.02	01			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bula n	7.815.536.302	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bula n	7.119.865.497	
2	**07**	**01**	**2.06**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Disnaker	**Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100 %	230.000.000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Disnaker	**Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100 %	166.654.400	
2	07	01	2.06	01			Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Disnaker	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	20.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Disnaker	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	15.000.000	
2	07	01	2.06	02			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disnaker	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	100.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disnaker	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	44.204.000	
2	07	01	2.06	04			Penyediaan bahan logistik kantor	Disnaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	20.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Disnaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	20.000.000	
2	07	01	2.06	05			Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Disnaker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.000.000	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Disnaker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.000.000	
2	07	01	2.06	09			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	70.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	70.000.000	
2	07	01	2.06	10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	7.450.000	

2	**07**	**01**	**2.08**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Disnaker	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.220.000.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Disnaker	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.215.000.000	
2	07	01	2.08	02			Penyediaan jasa komunikasi dan perlengkapan kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	470.000.000	Penyediaan jasa komunikasi dan perlengkapan kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	470.000.000	
2	07	01	2.08	03			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	15.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	15.000.000	
2	07	01	2.08	04			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	735.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	730.000.000	
2	**07**	**01**	**2.09**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Disnaker	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	**433.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Disnaker	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	**389.999.636**	
2	07	01	2.09	02			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 unit	190.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 unit	190.000.000	
2	07	01	2.09	09			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	243.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	199.999.636	

2	07	01	2.10				**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Disnaker	**Prosentase capaian standart pelayanan minimal**	100 %	50.000.000	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Disnaker	**Prosentase capaian standart pelayanan minimal**	100 %	50.000.000	
2	07	01	2.10	01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Disnaker	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	50.000.0000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Disnaker	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	50.000.0000	
2	07	02					**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Disnaker	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja**	100 %	35.000.0000	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Disnaker	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja**	100 %	34.936.500	
2	07	02	2.10				**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Disnaker	Prosentase Lembaga / Perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	16 %	35.000.000	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Disnaker	Prosentase Lembaga / Perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	16 %	34.936.500	
2	07	02	2.10	01			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Disnaker	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	25.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Disnaker	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	25.000.000	
2	07	02	2.10	02			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	20 perusahaan	10.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	20 perusahaan	9.936.500	
2	07	03					**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Disnaker	Persentase peserta pelatihan yang terserap DUDI	55 %	2.349.007.000	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Disnaker	Persentase peserta pelatihan yang terserap DUDI	55 %	1.743.842.900	

2	07	03	2.01				**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**		Prosentase Peserta Lulus Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	90 %	2.088.507.000	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**		Prosentase Peserta Lulus Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	90 %	1.743.842.900	
2	07	03	2.01	01			Proses pelaksanaan Pendididikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	652 orang	2.078.507.000	Proses pelaksanaan Pendididikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	652 orang	1.512.732.100	
2	07	03	2.01	02			Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Disnaker	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 lembaga	10.000.000	Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Disnaker	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 lembaga	9.788.000	
2	**07**	**03**	**2.02**				**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Disnaker	Prosentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swast	50 %	15.000.000	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Disnaker	Prosentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swast	50 %	7.800.300	
2	07	03	2.02	**01**			Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Disnaker	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 lembaga	15.000.000	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Disnaker	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 lembaga	7.800.300	
2	07	03	2.03				**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	Disnaker	Prosentase Perizinan dan Pendaftaran	49 %	10.000.000	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	Disnaker	Prosentase Perizinan dan Pendaftaran	49 %	7.000.300	

									Lembaga Pelatihan Kerja.					Lembaga Pelatihan Kerja.			
2	07	03	2.03	01			Penyediaan sumberdaya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Disnaker	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 perizinan	10.000.000	Penyediaan sumberdaya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Disnaker	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 perizinan	7.000.300	
2	**07**	**03**	**2.04**				**Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Disnaker	Prosentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100 %	209.000.000	**Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Disnaker	Prosentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100 %	181.572.000	
2	07	03	2.04	01			Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Disnaker	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50 perusahaan	209.000.000	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Disnaker	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	41 perusahaan	181.572.000	
2	**07**	**03**	**2.05**				**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota	10 %	26.500.000	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota	10 %	24.950.200	
2	07	03	2.05	01			Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Disnaker	Prosentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota	1 dokumen	26.500.000	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Disnaker	Prosentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota	1 dokumen	24.950.200	
2	**07**	**04**					**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Disnaker	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	66,75 %	511.000.000	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Disnaker	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	66,75 %	316.081.400	
2	**07**	**04**	**2.01**				**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Jumlah pencaker yang terfasilitasi Pelayanan Antarkerja	100 %	115.000.000	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Jumlah pencaker yang terfasilitasi Pelayanan Antarkerja	100 %	34.606.400	
2	07	04	2.01	02			Pelayanan Antar Kerja	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan	120 orang	30.000.000	Pelayanan Antar Kerja	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan	40 orang	8.951.000	

									Melalui Layanan AKAD dan AKL					Melalui Layanan AKAD dan AKL		
2	07	04	2.01	03			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 orang	15.000.000	Penyululuhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 orang	11.456.000	
2	07	04	2.01	04			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	200 orang	10.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	100 orang	4.200.000	
2	07	04	2.01	05			Perluasan Kesempatan Kerja	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	16 Orang	60.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	16 orang	9.999.400	
2	07	04	2.02				**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	35.000.000	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	17.636.000	
2	07	04	2.02	01			Penyediaan sumber daya perizinzn LPTKS secara terintegrasi	Disnaker	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	12 lembaga	10.000.000	Penyediaan sumber daya perizinzn LPTKS secara terintegrasi	Disnaker	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	12 lembaga	8.726.000	
2	07	04	2.02	02			Pengawasan dan pengendalian LPTKS	Disnaker	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	72 lembaga	25.000.000	Pengawasan dan pengendalian LPTKS	Disnaker	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	15 lembaga	8.910.000	
2	07	04	2.03				**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Disnaker	Prosentase Penyusunan Dokumen Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 %	261.000.000	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Disnaker	Prosentase Penyusunan Dokumen Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 %	217.364.000	

2	07	04	2.03	01			Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	Disnaker	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 dokumen	10.000.000	Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	Disnaker	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 dokumen	5.000.000	
2	07	04	2.03	02			Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Disnaker	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	5000 orang	50.000.000	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Disnaker	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1500 orang	12.364.000	
2	07	04	2.03	03			Job Fair / Bursa Kerja	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	500 orang	201.000.000	Job Fair / Bursa Kerja	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	500 orang	200.000.000	
2	**07**	**04**	**2.04**				**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Tenaga Kerja Tefasilitasi Pelindungan PMI	100 %	100.000.000	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Tenaga Kerja Tefasilitasi Pelindungan PMI	100 %	46.475.000	
2	07	04	2.04	01			Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Disnaker	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	16 orang	60.000.000	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Disnaker	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10 orang	24.176.000	
2	07	04	2.04	02			Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Disnaker	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	500 orang	10.000.000	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Disnaker	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	500 orang	8.511.000	
2	07	04	2.04	03			Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Disnaker	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 orang	30.000.000	Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Disnaker	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 orang	13.788.000	
2	**07**	**05**					**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Disnaker	Cakupan Perusahaan yang telah membuat PP (Peraturan Perusahaan)	80 %	190.000.000	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Disnaker	Cakupan Perusahaan yang telah membuat PP (Peraturan Perusahaan)	80 %	159.560.000	

2	**07**	**05**	**2.01**				**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjajanjian kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota**	Disnaker	Prosentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP)	40 %	46.000.000	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjajanjian kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota**	Disnaker	Prosentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP)	40 %	30.000.000	
2	07	05	2.01	01			Pengesahan peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 perusahaan	5.000.000	Pengesahan peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 perusahaan	5.000.000	
2	07	05	2.01	02			Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 perusahaan	5.000.000	Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 perusahaan	5.000.000	
2	07	05	2.01	03			Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Disnaker	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	70 laporan	36.000.000	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Disnaker	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	25 laporan	20.000.000	
2	**07**	**05**	**2.02**				**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Perusahaan yang terfasilitasi penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial	100 %	144.000.000	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Perusahaan yang terfasilitasi penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial	100 %	129.560.000	

2	07	05	2.02	01			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25 perkara	24.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25 perkara	21.750.000	
2	07	05	2.02	02			Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	25 perkara	17.000.000	Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	25 perkara	15.450.000	
2	07	05	2.02	03			Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afillasi	Disnaker	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	74 asosiasi dan Serikat Pekerja	17.000.000	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afillasi	Disnaker	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	7.000.000	
2	07	05	2.02	04			Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	30 lembaga	76.000.000	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	30 lembaga	75.360.000	
2	07	05	2.02	05			Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Disnaker	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 orang	10.000.000	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Disnaker	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 orang	10.000.000	
3	**32**						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	Disnaker				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	Disnaker				

3	**32**	**03**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	Disnaker				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	Disnaker			
3	**32**	**03**	**2.01**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Disnaker	Prosesntase Transmigran yang ditempatkan	100 %	65.000.0000	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Disnaker	Prosesntase Transmigran yang ditempatkan	100 %	40.000.0000	
3	32	03	2.01	01			**Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Lokasi penyediaan Permukiman transmigras	100 %	65.000.000	**Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Lokasi penyediaan Permukiman transmigras	100 %	40.000.000	
3	32	03	2.01	04			Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 laporan	15.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	10.000.000	
5	**07**	**03**	**2.02**				Pemindahan dan penempatan transmigrans yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 KK	50.000.000	Pemindahan dan penempatan transmigrans yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 KK	30.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan persiapan yang meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD dengan berpedoman pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 serta hasil evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 disusun setelah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Dari hasil Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah tersebut terdapat usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen selaku Perangkat Daerah, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Sragen.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelatihan pemasaran penjualan (Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Kel.Sragen Wetan. Kec.Sragen, Kab.Sragen	Terlaksananya pelatihan pemasaran penjualan	16 orang	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi tersebut adalah ***"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***, yang dilaksanakan melalui beberapa misi diantaranya :

1. Peningkatankualitas manusia Indonesia,
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing,
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan,
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan,
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kehidupan bangsa,
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga,
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya,
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana,dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik;

Berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Sragen menjabarkan kedalam visi misi yang diimplementasikan didalam strategi dan kebijakan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja dan pendanaan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Sragen yakni ***"Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera Dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong"***. Didalam renja tahun 2024 merupakan tahap ketiga atau tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026. Dalam mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM);
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi dan ketahanan pangan;
4. Menangani kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja;
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Mengacu pada kebijakan pada RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 untuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, memuat program prioritas, yakni

1) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3) Program Penempatan Tenaga Kerja;
4) Program Hubungan Industrial;
5) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Sragen , Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen berkontribusi dalam pencapaian misi keempat dalam RPJMD Kabupaten Sragen yaitu **"Menangani Kemiskinan dan Memperluas Kesempatan Kerja "**. Untuk Mencapai itu Dinas tenaga kerja Kabupaten Sragen berperan aktif dalam melaksanakan pencapaian sasaran yang ada dalam RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026.

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran implementasi dari misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun secara rinci tujuan yang ditetapkan selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut: " **Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja.** "

Selanjutnya tujuan strategis tersebut diuraikan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen adalah " **Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Yang Siap Kerja** ".

Tujuan, indikator tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Tujuan	:	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja
Indikator Tujuan	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Sasaran	:	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang siap kerja
Indikator Sasaran	:	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas, strategi yang ditempuh Dinas Tenaga Kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur.
2. Peningkatan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan.
3. Peningkatan keterampilan tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai.

4. Peningkatan pengawasan tentang norma ketenagakerjaan.
5. Peningkatan mitra usaha khususnya mitra tenaga kerja dalam ketenagakerjaan dan penyaluran tenaga kerja.
6. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Direncanakan pada tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen akan melaksanakan 6 Program, 19 Kegiatan, dan 44 Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan tersebut akan dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sragen.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif adalah Rp.11.107.519.133,- (Sebelas milyar seratus tujuh juta lima ratus sembilan belas seratus tiga puluh tiga rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, dengan kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
c) Penyediaan bahan logistik kantor.
d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
e) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
f) Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

5. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
   a) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   b) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

1. *Peningkatan Pelayanan BLUD*
   a) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

2) Program Perencanaan Tenaga Kerja

1. *Penyusunan Rencana Tenaga Kerja*
   a) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.
   b) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.

3) Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. *Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi*
   a) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
   b) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.
2. *Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta*
   a) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
3. *Perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja*
   a) Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi.
4. *Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil*
   a) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.
5. *Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*
   a) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.

4) Program Penempatan Tenaga Kerja

1. *Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota*
   a) Pelayanan antar Kerja
   b) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
   c) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
   d) Perluasan Kesempatan Kerja
2. *Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota*

a) Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi

b) Pengawasan dan Pengendalian LPTKS

3. *Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*

a) Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

b) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

c) Job Fair/Bursa Kerja

4. *Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota*

a) Peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/PMI

b) Penyediaan layanan terpadu pada Calon Pekerja Migran

c) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

5) Program Hubungan Industrial

1. *Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*

a) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

b) Pendaftaran Perjanjian kerjasama bagi perusahaan

c) Penyelenggaraan pendataan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial Tenaga Kerja serta pengupahan.

2. *Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota*

a) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

b) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

c) Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

d) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

e) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

6) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Urusan Pilihan)

1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1(satu) Daerah Kabupaten Kota

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

b) Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RencanaTahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	**07**				**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**		Kabupaten Sragen						
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**	**8.896.519.533**			**100 %**	**9.708.536.302**
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100 %	5.000.000	DAU		100 %	10.000.000
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 dokumen	5.000.000	DAU		5 dokumen	10.000.000
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	7.119.865.497	DAU		100 %	7.815.536.302
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		61 Orang/bulan	7.119.865.497	DAU		61 Orang/bulan	7.815.536.302
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	166.654.400	DAU		100 %	166.654.400

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RencanaTahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
					Daerah								
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	15.000.000	DAU		1 Paket	15.000.000
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	44.204.400	DAU		1 Paket	100.000.000
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	20.000.000	DAU		1 Paket	20.000.000
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	10.000.000	DAU		1 Paket	10.000.000
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	70.000.000	DAU		12 Laporan	70.000.000
2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 Dokumen	7.450.000	DAU		12 Dokumen	10.000.000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1.215.000.000	DAU		100 %	1.220.000.000
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	470.000.000	DAU		1 Laporan	470.000.000
2	07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	15.000.000	DAU		12 Laporan	15.000.000
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	730.000.000	DAU		12 Laporan	735.000.000
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	389.999.636	DAU		100 %	433.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RencanaTahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		45 Unit	199.999.636	DAU		45 Unit	243.000.000
2	07	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian Standart Pelayanan Minimal BLUD		100 %	50.000.000	DAU		100 %	50.000.000
2	07	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	50.000.000	DAU		1 Unit Kerja	50.000.000
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			**100 %**	**34.963.500**	DAU		**100 %**	**35.000.000**
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Prosentase lembaga/ perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)		100 %	34.963.500	DAU		100 %	35.000.000
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		1 Dokumen	25.000.000	DAU		1 Dokumen	25.000.000
2	07	02	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		20 Perusahaan	9.963.500	DAU		20 Perusahaan	10.000.000
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**65 %**	**1.719.817.000**	DAU		**65 %**	**2.399.854.942**
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Prosentase Peserta lulus Peatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		90 %	1.610.245.800	DAU		90 %	2.139.354.942
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		556 Orang		DAU		652 Orang	2.129.354.942
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		1 Lembaga	9.788.000	DAU		1 Lembaga	9.788.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RencanaTahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		50 %	7.800.300	DAU		50 %	15.000.000
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		30 lembaga	7.800.300	DAU		30 lembaga	15.000.000
2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Prosentase perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		49 %	7.000.300	DAU		49 %	10.000.000
2	07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegras	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi		5 Perizinan	7.000.300	DAU		5 Perizinan	7.000.300
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengukuran produktivitas tingkat daerah Kabupaten/ Kota		10 %	24.950.200	DAU		10 %	24.950.200
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		1 Dokumen	24.950.200	DAU		1 Dokumen	24.950.200
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**70,85 %**	**316.081.400**	DAU		**70,85 %**	**496.000.000**
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah pencaker yang terfasilitasi Pelayanan Antar Kerja		100 %	34.606.400	DAU		100 %	34.606.400
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		40 Orang	8.951.000	DAU		40 Orang	30.000.000
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		500 Orang	11.456.000	DAU		500 Orang	11.456.000
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD		100 Orang	4.200.000	DAU		100 Orang	10.000.000
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		16 Orang	9.999.400	DAU		16 Orang	60.000.000
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Prosentase Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta		100 %	17.636.000	DAU		100 %	20.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RencanaTahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
					Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
2	07	04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi		12 Lembaga	8.726.000	DAU		12 Lembaga	10.000.000
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku		15 Lembaga	8.910.000	DAU		15 Lembaga	10.000.000
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Prosentase Penyusunan Dokumen Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		100 %	217.364.000	DAU		100 %	261.000.000
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		12 Dokumen	5.000.000	DAU		12 Dokumen	10.000.000
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		1500 Orang	12.364.000	DAU		1500 Orang	50.000.000
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja			200.000.000	DAU		201.000.000	
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Tenaga Kerja Tefasilitasi Pelindungan PMI		100 %	46.475.000	DAU		100 %	100.000.000
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		10 orang	24.176.000	DAU		16 orang	60.000.000
2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani		500 Orang	8.511.000	DAU		500 Orang	10.000.000
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan		10 Orang	13.788.000	DAU		10 Orang	30.000.000
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**80 %**	**67.200.000**	DAU		**80 %**	**197.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RencanaTahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan (PP)		40 %	30.000.000	DAU		40 %	46.000.000
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaa	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		5 Perusahaan	5.000.000	DAU		5 Perusahaan	5.000.000
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		5 Perusahaan	5.000.000	DAU		5 Perusahaan	5.000.000
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		25 Laporan	20.000.000	DAU		25 Laporan	36.000.000
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perusahaan yang terfasilitasi penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial		100 %	37.200.000	DAU		100 %	45.000.000
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		25 Perkara	21.750.000	DAU		25 Perkara	25.000.000
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		25 Perkara	15.450.000	DAU		25 Perkara	20.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RencanaTahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
					Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					DAU			
3	32				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**					DAU			
3	32	03			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Prosentase Transmigran yang ditempatkan**		**100 %**	**40.000.000**	DAU		**100 %**	**40.000.000**
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Lokasi penyediaan Permukiman transmigrasi		100 %	40.000.000	DAU		100 %	40.000.000
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	10.000.000	DAU		1 Laporan	15.000.000
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan		1 Kepala Keluarga	30.000.000	DAU		1 Kepala Keluarga	50.000.000

Sumber Data : Peraturan Bupati Sragen Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang disusun sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, serta sesuai dengan arah kebijakan nasional.

Namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti berikut:

1. Pagu indikatif Rencana Kerja Pemerimtah Daerah Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen sebesar Rp. 11.107.519.133,00 (Sebelas milyar seratus tujuh juta lima ratus sembila belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan rencana kerja ini mewajibkan konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan segenap *stakeholders* untuk melaksanakan rencana kerja ini. Selain itu, dibutuhkan pula peran serta masyarakat dalam mendukung rencana kerja ini;
3. Apabila dalam perjalanannya terjadi perubahan situasi dari keadaan normal pada saat Rencana Kerja ini dibuat, baik yang bersifat memperlambat maupun mempercepat pencapaian sasaran kinerja, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Demikian, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 ini disusun dan ditetapkan, untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Sragen, 2 Agustus 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN SRAGEN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS TENAGA KERJA

Ir. AGUS WINARNO, S.Sos.,M.Si.

NIP. 19710313 199803 1 008

LAMPIRAN

SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS TENAGA KERJA
Jl. RA. Kartini No. 160, Telp (0271) 890645
S R A G E N – 57222

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 050.25/599/16/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2024

KEPALA DINAS DINAS TENAGA KERJA

Menimbang :

a. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 1);

8. Surat Edaran Nomor : 900/26325/II/2023 tentang Pedoman Penyusunan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Dasar Renja Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja ini.

KEDUA : Tugas pokok satuan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dalam proses penyusunan dokumen: rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen tahun 2024;
2. Menyampaikan dokumen rencana kerja Dinas Tenaga Kerja tahun 2024 sebagaimana poin 1 kepada Tim Teknis verifikasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
3. Menindaklanjuti hasil verifikasi pada poin 2, sebelum dilakukan pengesahan Bupati.

KETIGA : Masa kerja Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen adalah selama 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sragen
pada tanggal : 2 Februari 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SRAGEN



AGUS WINARNO, S.Sos., MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19710313 199803 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 050.25/~~3558~~ /16/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA DINAS DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA
DINAS DINAS TENAGA KERA KABUPATEN SRAGEN
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	AGUS WINARNO , S.Sos, M.Si	Kepala Dinas	Pembina
2.	ANDRI UTOMO , SE.M.M	Plt. Sekretaris	Ketua
3.	MURSITO, ST, MT	Kabid Penempatan Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM	Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM
4.	ANDRI UTOMO , SE.M.M	Kabid Perencanaan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
5.	BUDI YUWONO, S.Kom, M.Eng	Kabid Hubungan Industrial	Bidang Hubungan Industrial
6.	a. Sekretaris 1. Endah Yuniwati, ST 2. Anita Desi Putrianti, SE	 Kasubag Umum & Kepegawaian Analis Keuangan Pusat dan Daerah	 Anggota Anggota

7.	b. Anggota Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM		
	1. Darmanto, SE	Kasi Transmigrasi dan ESDM	Anggota
	2. Ernawan, ST., MM	Pengantar Kerja	Anggota
8.	c. Anggota Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Produktivitas 1. Umi Thoyibah, SE	Pengantar Kerja	Anggota
9.	d. Anggota Hubungan Industrial		
	1. Sri Yatun, SE., M.M	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	Anggota
	2. Nur Baharudin, SH. MH	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	Anggota

Sragen, 2 Februari 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SRAGEN

AGUS WINARNO, S.Sos., MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19710313 199803 1 008